

**Judul** : Komisi VIII ingatkan risiko telat bayar PK haji, jemaah haji khusus bakal gagal berangkat  
**Tanggal** : Rabu, 07 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Komisi VIII Ingatkan Risiko Telat Bayar PK Haji

# Jemaah Haji Khusus Bakal Gagal Berangkat

Dana Pengembalian Keuangan (PK) jemaah haji khusus belum cair dan masih tertahan di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal itu berpotensi menggagalkan keberangkatan ribuan calon jemaah haji khusus pada 2026.

ANGGOTA Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid mendorong Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membentuk tim verifikasi administrasi guna memastikan proses PK jemaah haji khusus berjalan tepat waktu. "Perlu koordinasi intensif dan pembentukan tim pendampingan teknis khusus untuk mengatasi persoalan ini," ujar Hidayat, kemarin.

Sebanyak 13 Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah (PIHK) sebelumnya telah mengingatkan Kemenhaj mengenai potensi gagal berangkatnya jemaah haji khusus 2026. Keterlambatan pencairan PK dinilai menghambat proses pengurusan visa serta pembayaran layanan di Arab Saudi.

Padahal, pembayaran paket layanan haji di Saudi berlangsung sejak 4 Januari hingga 1 Februari 2026. Sementara batas akhir pembayaran layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) ditetapkan pada 4 Januari 2026.

Hidayat memahami adanya penyesuaian regulasi PK yang dilakukan Kemenhaj demi perlindungan jemaah. Namun, dengan waktu penyelenggaraan haji yang

semakin singkat, pendampingan teknis administratif kepada PIHK menjadi sangat penting agar seluruh kuota haji Indonesia, baik reguler maupun khusus, dapat terserap sesuai ketentuan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan keterangan asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), dana PK setoran jemaah haji khusus belum dicairkan akibat kendala administrasi. Hambatan tersebut terutama terkait verifikasi dokumen pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji (Siskohat), termasuk integrasi data kesehatan jemaah melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu bidang Kesehatan (Siskohatkes).

Menurut Hidayat, tahun 2025 menjadi tahun pertama pengelolaan Siskohat beralih dari Kementerian Agama ke Kemenhaj, sekaligus pertama kalinya data kesehatan terintegrasi penuh ke dalam sistem. Kondisi ini memunculkan sejumlah persoalan teknis, baik pada haji reguler maupun khusus.

Karena itu, ia menyarankan disiapkannya rencana kontingensi melalui verifikasi manual. Jika Kemenhaj mengalami keterbatasan sumber daya manusia,



Hidayat Nur Wahid

Hidayat mengusulkan pembukaan program magang, misalnya bagi mahasiswa manajemen haji dan umrah, untuk membantu percepatan verifikasi dokumen.

Ia menegaskan, BPKH telah menjamin dana PK haji khusus serta Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler tersedia dan siap dicairkan setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap. Selain itu, Hidayat mengapresiasi langkah Kemenhaj yang tetap membuka layanan bagi jemaah reguler di hari libur.

Menurutnya, layanan serupa juga perlu diberikan kepada jemaah haji khusus melalui PIHK agar seluruh jemaah yang berhak berangkat pada 2026 memperoleh kepastian keberangkatan dan waktu persiapan manasik yang memadai.

Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania menambahkan,

transisi penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kemenhaj harus dibarengi kesiapan teknis dan peningkatan kualitas pelayanan, terutama yang bersentuhan langsung dengan calon jemaah. "Komisi VIII DPR terus menjalankan fungsi pengawasan agar proses transisi tidak menimbulkan kendala di lapangan," ujarnya.

Dini menyebut, proses persiapan haji 2026 saat ini telah memasuki tahap pelunasan biaya. Di Jawa Timur, sekitar 70 persen calon jemaah telah melunasi biaya haji. Pemerintah menargetkan seluruh pelunasan rampung sesuai batas waktu yang ditetapkan pada awal Januari 2026.

Ia juga memastikan kesiapan akomodasi jemaah di Arab Saudi telah mencapai sekitar 80 persen dan sejauh ini tidak ditemukan persoalan signifikan terkait fasilitas dasar. Yang harus dilakukan pelaksanaan manasik haji di daerah agar calon jemaah memiliki pemahaman utuh mengenai tata cara ibadah.

Ia juga menilai wacana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi berpotensi menekan biaya penyelenggaraan haji sehingga lebih efisien. "Presiden Prabowo menginginkan pelaksanaan haji dilakukan seefisien mungkin agar beban biaya jemaah dapat berkurang," kata politisi NasDem itu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan Haji

Kemenhaj Ian Heriyawan memastikan pihaknya berkomitmen menyelesaikan proses pelunasan dan penerbitan PK jemaah haji khusus sebelum tenggat yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

"Kami melakukan koordinasi rutin dengan PIHK untuk memastikan percepatan seluruh proses berjalan optimal," ujarnya.

Ian menjelaskan, dana PK harus dicairkan ke rekening PIHK di Arab Saudi agar pembayaran layanan jemaah dapat dilakukan tepat waktu. Ia mengakui masih terdapat penyesuaian sistem dan regulasi yang memengaruhi proses pencairan PK. Namun, pihaknya optimistis seluruh penyesuaian dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Terkait risiko tidak terserapnya kuota haji khusus, Ian menyatakan pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi dengan meningkatkan kuota cadangan dari 50 persen menjadi 100 persen. Cadangan tersebut berasal dari jemaah pada nomor urut berikutnya yang semestinya berangkat pada tahun selanjutnya.

Selain itu, Kemenhaj juga meng-kaji penerapan kebijakan darurat, termasuk pembukaan layanan pelunasan pada akhir pekan, guna mempercepat proses administrasi. "Kami pastikan jemaah yang telah melunasi biaya akan segera diproses PK-nya agar tidak mengganggu kontrak layanan PIHK di Arab Saudi," pungkas Ian. ■